



NAGARI MUARA INDERAPURA
KABUPATEN PESISIR SELATAN

PERATURAN NAGARI MUARA INDERAPURA
NOMOR 2 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN NAGARI NOMOR 7 TAHUN 2021 TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NAGARI MUARA INDERAPURA.
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI NAGARI MUARA INDERAPURA,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan rencana anggaran yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, karena adanya perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan, perlu dilakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dan Korupsi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Lembar Negara Tahun 2000 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

5. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4575);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2022 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 21);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
17. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
18. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan dan Pemeringkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 252);
19. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 961);
20. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 128/PMK.07/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 819);
21. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 40 Tahun 2019 Tentang Penghasilan Tetap dan Tunjangan Wali Nagari, Perangkat Nagari serta Tunjangan Kehormatan Badan Permusyawaratan Nagari;
22. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 156 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2022;
23. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 155 Tahun 2021 Tentang Standar Harga Pemerintah Nagari Tahun Anggaran 2022;
24. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 191 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah setiap Nagari yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2022;
25. Surat Bupati Pesisir Selatan Nomor 140/611/DPMDPPKB-PS/2022 tanggal 26 September 2022 Perihal Penggunaan Dana Desa pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun 2022;
26. Peraturan Nagari Muara Inderapura Nomor 03 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari Tahun 2018 s/d 2024 (Lembaran Desa Muara Inderapura Tahun 2018 Nomor 03);
27. Peraturan Nagari Muara Inderapura Nomor 02 Tahun 2019 Tentang Kewenangan Nagari berdasarkan Hak Asal

Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Nagari (Lembaran Desa Muara Inderapura Tahun 2019 Nomor 03);

28. Peraturan Nagari Muara Inderapura Nomor 06 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Nagari Tahun 2022 (Lembaran Nagari Muara Inderapura Tahun 2021 Nomor 06);

29. Peraturan Nagari Nomor 7 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Nagari Tahun 2022;

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI MUARA INDERAPURA
Dan
WALI NAGARI MUARA INDERAPURA
MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN NAGARI TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NAGARI MUARA INDERAPURA TAHUN ANGGARAN 2022

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2022 semula berjumlah Rp. 1.456.656.671,00,- (*Satu Milyar Empat Ratus Limah Puluh Enam Juta Enam Ratus Limah Puluh Enam Ribu Enam Ratus Tujuh Puluh Satu Rupiah*), berkurang sejumlah Rp.0,00,- (*Nol Rupiah*) sehingga menjadi Rp.1.456.656.671,00,- (*Satu Milyar Empat Ratus Limah Puluh Enam Juta Enam Ratus Limah Puluh Enam Ribu Enam Ratus Tujuh Puluh Satu Rupiah*) dengan rincian setelah perubahan sebagai berikut:

1. Pendapatan Nagari

a. Semula	Rp. 1.456.656.671,00
b. Berkurang	Rp. 0,00
Jumlah pendapatan	Rp. 1.456.656.671,00

2. Belanja Nagari

a. Semula	Rp. 1.486.056.626,64
b. Berkurang	Rp. 0,00
Jumlah belanja	Rp. 1.486.056.626,64
Surplus/(Defisit)	Rp. (29.399.955,64)

3. Pembiayaan

3.1. Penerimaan Pembiayaan

a. Semula	Rp. 29.399.955,64
b. Bertambah	Rp. 0,00
Jumlah penerimaan	Rp. 29.399.955,64

3.2. Pengeluaran Pembiayaan

c. Semula	Rp. 0,00
d. bertambah/(berkurang)	Rp. 0,00
Jumlah penerimaan	Rp. 0,00
Selisih Pembiayaan (3.1 - 3.2)	Rp. 29.399.955,64

Silpa Perhitungan Anggaran **Rp. 0,00**

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari sebagaimana dimaksud Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Nagari ini.

Pasal 3

Wali Nagari menetapkan Peraturan Wali Nagari tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan APB Nagari.

Pasal 4

Peraturan Nagari ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Nagari ini dalam Lembaran Nagari Muara Inderapura.

Ditetapkan di : Muara Inderapura

Pada tanggal : 12 Oktober 2022

WALI NAGARI MUARA INDERAPURA



Diundangkan di : Muara Inderapura

Pada tanggal : 12 Oktober 2022

SEKRETARIS NAGARI MUARA INDERAPURA

ZETRIA PUTRA MAIZI

LEMBARAN NAGARI MUARA INDERAPURA TAHUN 2022 NOMOR 2 ;

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH NAGARI MUARA INDERAPURA
TAHUN ANGGARAN 2022**

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	KETERANGAN
		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6
4.	PENDAPATAN				
4.1.	Pendapatan Asli Desa	0.00	0.00	0.00	
4.2.	Pendapatan Transfer	1,455,156,671.00	1,455,156,671.00	0.00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	
	JUMLAH PENDAPATAN	1,456,656,671.00	1,456,656,671.00	0.00	
5.	BELANJA				
5.1.	Belanja Pegawai	405,901,000.00	405,601,000.00	(300,000.00)	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	578,655,626.64	625,575,626.64	46,920,000.00	
5.3.	Belanja Modal	12,700,000.00	29,300,000.00	16,600,000.00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	488,800,000.00	425,580,000.00	(63,220,000.00)	
	JUMLAH BELANJA	1,486,056,626.64	1,486,056,626.64	0.00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(29,399,955.64)	(29,399,955.64)	0.00	
6.	PEMBIAYAAN				
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	29,399,955.64	29,399,955.64	0.00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	29,399,955.64	29,399,955.64	0.00	
	PEMBIAYAAN NETTC	29,399,955.64	29,399,955.64	0.00	

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	KETERANGAN
		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6
	SISA LEBIH / (KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN	0.00	0.00	0.00	

Muara Inderapura, 12 October 2022



**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH NAGARI MUARA INDERAPURA
TAHUN ANGGARAN 2022**

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
1	2		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6	7
	1.	PENDAPATAN				
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	0.00	0.00	0.00	
	4.1.1.	Hasil Usaha Desa	0.00	0.00	0.00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	1,455,156,671.00	1,455,156,671.00	0.00	
	4.2.1.	Dana Desa	1,013,211,000.00	1,013,211,000.00	0.00	
	4.2.2.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	23,819,071.00	23,819,071.00	0.00	
	4.2.3.	Alokasi Dana Desa	418,126,600.00	418,126,600.00	0.00	
	4.2.5.	Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota	0.00	0.00	0.00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	
	4.3.5.	Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-tahun Sebelumnya	0.00	0.00	0.00	
	4.3.6.	Bunga Bank	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	
		JUMLAH PENDAPATAN	1,456,656,671.00	1,456,656,671.00	0.00	
	2.	BELANJA				
<u>1.</u>		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>479,451,598.18</u>	<u>475,921,598.18</u>	<u>(3,530,000.00)</u>	
1.1		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa (Maksimal 30% untuk kegia	<u>425,986,157.18</u>	<u>425,986,157.18</u>	<u>0.00</u>	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	51,600,000.00	51,600,000.00	0.00	
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	51,600,000.00	51,600,000.00	0.00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	279,925,000.00	279,625,000.00	(300,000.00)	
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	279,925,000.00	279,625,000.00	(300,000.00)	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	3,876,000.00	3,876,000.00	0.00	

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
1	2		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6	7
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	3,876,000.00	3,876,000.00	0.00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD, l	16,885,157.18	17,185,157.18	300,000.00	
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	16,885,157.18	17,185,157.18	300,000.00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	68,700,000.00	68,700,000.00	0.00	
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	68,700,000.00	68,700,000.00	0.00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Perlengkapan Per	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	
1.1.06	5.1.	Belanja Pegawai	1,800,000.00	1,800,000.00	0.00	
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3,200,000.00	3,200,000.00	0.00	
1.2		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	5,600,000.00	6,900,000.00	1,300,000.00	
1.2.01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	4,200,000.00	5,500,000.00	1,300,000.00	
1.2.01	5.3.	Belanja Modal	4,200,000.00	5,500,000.00	1,300,000.00	
1.2.02		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	1,400,000.00	1,400,000.00	0.00	
1.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1,400,000.00	1,400,000.00	0.00	
1.3		Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	17,523,441.00	6,195,941.00	(11,327,500.00)	
1.3.02		Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (Dipilih)	14,659,000.00	6,195,941.00	(8,463,059.00)	
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14,659,000.00	6,195,941.00	(8,463,059.00)	
1.3.05		Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	2,864,441.00	0.00	(2,864,441.00)	
1.3.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2,864,441.00	0.00	(2,864,441.00)	
1.4		Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	25,942,000.00	33,139,500.00	7,197,500.00	
1.4.02		Penyelenggaraan Musyawaran Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non R	12,143,000.00	15,008,000.00	2,865,000.00	
1.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12,143,000.00	15,008,000.00	2,865,000.00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	4,457,500.00	8,790,000.00	4,332,500.00	
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4,457,500.00	8,790,000.00	4,332,500.00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ	6,952,500.00	6,952,500.00	0.00	
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6,952,500.00	6,952,500.00	0.00	

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
1	2		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6	7
1.4.07		<i>Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyar.</i>	889,000.00	889,000.00	0.00	
1.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	889,000.00	889,000.00	0.00	
1.4.08		<i>Pengembangan Sistem Informasi Desa</i>	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	
1.5		Sub Bidang Pertanahan	4,400,000.00	3,700,000.00	(700,000.00)	
1.5.06		<i>Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)</i>	4,400,000.00	3,700,000.00	(700,000.00)	
1.5.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4,400,000.00	3,700,000.00	(700,000.00)	
2.		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	287,825,000.00	304,170,000.00	16,345,000.00	
2.1		Sub Bidang Pendidikan	74,760,000.00	70,800,000.00	(3,960,000.00)	
2.1.01		<i>Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (i</i>	74,760,000.00	70,800,000.00	(3,960,000.00)	
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	74,760,000.00	70,800,000.00	(3,960,000.00)	
2.2		Sub Bidang Kesehatan	53,250,000.00	55,800,000.00	2,550,000.00	
2.2.02		<i>Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, KIs Bumil, Lamsia, Insentif)</i>	34,110,000.00	34,110,000.00	0.00	
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	34,110,000.00	34,110,000.00	0.00	
2.2.04		<i>Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan</i>	10,660,000.00	10,660,000.00	0.00	
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10,660,000.00	10,660,000.00	0.00	
2.2.06		<i>Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)</i>	7,080,000.00	7,080,000.00	0.00	
2.2.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7,080,000.00	7,080,000.00	0.00	
2.2.09		<i>Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/PrasaranaPosy</i>	1,400,000.00	3,950,000.00	2,550,000.00	
2.2.09	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1,400,000.00	3,950,000.00	2,550,000.00	
2.3		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	65,000,000.00	65,000,000.00	0.00	
2.3.17		<i>Pembuatan/Permukiman Peta Wilayah dan Sosial Desa (Dipilih)</i>	65,000,000.00	65,000,000.00	0.00	
2.3.17	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	65,000,000.00	65,000,000.00	0.00	
2.4		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	77,000,000.00	81,800,000.00	4,800,000.00	
2.4.01		<i>Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak</i>	31,000,000.00	31,000,000.00	0.00	
2.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	31,000,000.00	31,000,000.00	0.00	

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
1	2		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6	7
2.4.06		Pemeliharaan Fasilitas Jamban Umum/MCK Umum dll	46,000,000.00	46,000,000.00	0.00	
2.4.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	46,000,000.00	46,000,000.00	0.00	
2.4.17		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Taman/Taman Bermain Anak Milik	0.00	4,800,000.00	4,800,000.00	
2.4.17	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	
2.4.17	5.3.	Belanja Modal	0.00	3,800,000.00	3,800,000.00	
2.5		Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	2,315,000.00	10,770,000.00	8,455,000.00	
2.5.02		Pengelolaan Lingkungan Hidup Milik Desa	2,315,000.00	10,770,000.00	8,455,000.00	
2.5.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2,315,000.00	1,770,000.00	(545,000.00)	
2.5.02	5.3.	Belanja Modal	0.00	9,000,000.00	9,000,000.00	
2.6		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	15,500,000.00	20,000,000.00	4,500,000.00	
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	9,500,000.00	12,000,000.00	2,500,000.00	
2.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	
2.6.02	5.3.	Belanja Modal	8,500,000.00	11,000,000.00	2,500,000.00	
2.6.03		Pembuatan dan Pengelolaan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi L	6,000,000.00	8,000,000.00	2,000,000.00	
2.6.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6,000,000.00	8,000,000.00	2,000,000.00	
3.		BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	26,980,028.46	31,855,028.46	4,875,000.00	
3.2		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	11,000,000.00	13,475,000.00	2,475,000.00	
3.2.03		Penyelenggaran Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT	11,000,000.00	13,475,000.00	2,475,000.00	
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11,000,000.00	13,475,000.00	2,475,000.00	
3.3		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	
3.3.04		Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olahraga Milik Desa	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	
3.3.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	
3.4		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	10,980,028.46	13,380,028.46	2,400,000.00	
3.4.01		Pembinaan Lembaga Adat	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	
3.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	
3.4.02		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	3,424,028.46	3,424,028.46	0.00	

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
1	2		SEMULA	MENJADI		
3	4	5	6	7		
3.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3,424,028.46	3,424,028.46	0.00	
3.4.03		Pembinaan PKK	5,056,000.00	7,456,000.00	2,400,000.00	
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5,056,000.00	7,456,000.00	2,400,000.00	
4.		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>203,000,000.00</u>	<u>248,530,000.00</u>	<u>45,530,000.00</u>	
4.2		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	<u>203,000,000.00</u>	<u>248,530,000.00</u>	<u>45,530,000.00</u>	
4.2.01		Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (alat produksi/pengelolaan/penggil	203,000,000.00	248,530,000.00	45,530,000.00	
4.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	203,000,000.00	248,530,000.00	45,530,000.00	
5.		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA</u>	<u>488,800,000.00</u>	<u>425,580,000.00</u>	<u>(63,220,000.00)</u>	
5.1		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	<u>82,000,000.00</u>	<u>11,500,000.00</u>	<u>(70,500,000.00)</u>	
5.1.00		Penanggulangan Bencana	82,000,000.00	11,500,000.00	(70,500,000.00)	
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	82,000,000.00	11,500,000.00	(70,500,000.00)	
5.2		Sub Bidang Keadaan Darurat	0.00	<u>5,000,000.00</u>	<u>5,000,000.00</u>	
5.2.00		Penanganan Keadaan Darurat	0.00	5,000,000.00	5,000,000.00	
5.2.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	0.00	5,000,000.00	5,000,000.00	
5.3		Sub Bidang Keadaan Mendesak	<u>406,800,000.00</u>	<u>409,080,000.00</u>	<u>2,280,000.00</u>	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	406,800,000.00	409,080,000.00	2,280,000.00	
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	406,800,000.00	409,080,000.00	2,280,000.00	
		JUMLAH BELANJA	1,486,056,626.64	1,486,056,626.64	0.00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	(29,399,955.64)	(29,399,955.64)	0.00	
3.		PEMBIAYAAN				
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	29,399,955.64	29,399,955.64	0.00	
6.1.1.		SILPA Tahun Sebelumnya	29,399,955.64	29,399,955.64	0.00	
		PEMBIAYAAN NETTC	29,399,955.64	29,399,955.64	0.00	

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
			SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6	7
SISA LEBIH / (KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN			0.00	0.00	0.00	

Muara Inderapura, 12 October 2022

WALI NAGARI



SIONI